

**PENGUMUMAN****LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

**BIDANG** : EKSEKUTIF**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN**UNIT KERJA** : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RUSTAN MASSINAI
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 180676

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 169 m<sup>2</sup>/90 m<sup>2</sup> di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m<sup>2</sup>/90 m<sup>2</sup> di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m<sup>2</sup>/75 m<sup>2</sup> di KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 652.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV MUGEN 0 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV MOBIL JEEP Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 46.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 71.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total

Rp. 2.719.000.000

**III. HUTANG**

Rp. 376.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 2.343.000.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpnn.kpk.go.id](http://elhkpnn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpnn.kpk.go.id](http://elhkpnn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NENENG MARTINI
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMA
3. NHK : 218878

**II. DATA HARTA**

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	530.000.000
1. Tanah Seluas 48 m <sup>2</sup> di BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m <sup>2</sup> /75 m <sup>2</sup> di BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	78.700.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.700.000		
2. MOBIL, BMW 323I AT Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>615.200.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>270.000.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>345.200.000</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpnn.kpk.go.id](http://elhkpnn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpnn.kpk.go.id](http://elhkpnn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : DIKA KADARWATI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 691236

**II. DATA HARTA**

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	900.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 251 m <sup>2</sup> /150 m <sup>2</sup> di BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	188.000.000
1. MOBIL, HONDA HRV TIPE 1.5 S MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	30.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.118.000.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>400.000.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>718.000.000</b>

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpnp.kpk.go.id](http://elhkpnp.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpnp.kpk.go.id](http://elhkpnp.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Periodik - 2024)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ABDI HUDAYYA
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 789619

**II. DATA HARTA**

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	700.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m <sup>2</sup> /40 m <sup>2</sup> di BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	4.000.000
1. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.225.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	140.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>706.365.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>706.365.000</b>

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpnp.kpk.go.id](http://elhkpnp.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpnp.kpk.go.id](http://elhkpnp.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN****LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

**BIDANG** : EKSEKUTIF**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN**UNIT KERJA** : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NINE TRIANI UTAMI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGETAHUAN
3. NHK : 928665

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m<sup>2</sup>/170 m<sup>2</sup> di BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m<sup>2</sup>/55 m<sup>2</sup> di BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 128.000.000

1. MOBIL, TOYOTA ETIOS VALCO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 115.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 1.493.000.000**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.493.000.000

Catatan:



- 
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpnn.kpk.go.id](http://elhkpnn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpnn.kpk.go.id](http://elhkpnn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



## PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF  
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN  
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

### I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERIK MUBAROK
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 794284

### II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	185.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m <sup>2</sup> /54 m <sup>2</sup> di GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	85.000.000
1. MOBIL, HONDA MOBILIO E Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	40.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	313.500.000
III. HUTANG	Rp.	153.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	160.500.000

### Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkn.kpk.go.id](http://elhkn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkn.kpk.go.id](http://elhkn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.